

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Penelitian

Demokrasi merupakan suatu sistem sosial dan politik yang berfokus pada kepentingan masyarakat baik individu maupun kelompok. Secara etimologis, demokrasi merupakan kata yang berasal dari dua kata dalam Bahasa Yunani yakni Demos yang berarti rakyat dan Kratos yang berarti pemerintahan. Secara langsung, demokrasi dapat kita artikan sebagai pemerintahan yang berasal dan dijalankan oleh rakyat. Kini pengertian demokrasi yang umum di masyarakat adalah suatu system pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Charles Frederick Strong, demokrasi diartikan sebagai suatu system pemerintahan yang mayoritas anggota dari masyarakat politik ikut serta atas dasar system perwakilan yang menjamin pemerintahan akan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada mayoritas. Menurut Samuel Huntington, demokrasi sebagai system pemerintahan merupakan adanya pembuatan keputusan secara kolektif yang dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala dalam system dengan persaingan para calon untuk memperoleh semua atau mayoritas suara penduduk dewasa. Sementara itu, menurut (Kuntowijoyo 2018a, 68) demokrasi dapat dibedakan menjadi tiga yakni demokrasi politik, demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi. Demokrasi politik dapat terwujud bila dalam distribusi kekuasaan masyarakat berada di atas negara. Demokrasi sosial terjadi jika jaminan kesejahteraan warga negara mendapat alokasi memadai. Demokrasi ekonomi terwujud bila kekuasaan-kekuasaan produktif berada di tangan bagian terbesar

masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang mengedepankan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem melalui perwakilan yang dipilih dengan cara pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala untuk memperoleh suara mayoritas agar tercipta distribusi kekuasaan masyarakat di atas negara. Penentuan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat merepresentasikan kehendak masyarakat mayoritas.

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, suara rakyat merupakan salah satu unsur paling penting dalam menentukan pilihan-pilihan atau kebijakan yang nantinya menjadi arah dan tujuan negara. Kepemilikan hak yang setara antara tiap-tiap individu yang ada menjadikan negara demokrasi seharusnya mengizinkan tiap-tiap warga negaranya untuk turut serta berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan dalam penyelenggaraan negara. Tiap-tiap warga negara yang terhimpun dalam sistem demokrasi pada intinya memiliki hak yang sama dan setara antara satu dengan lainnya. Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, turut serta melindungi hak yang dimiliki tiap warga negaranya. Di Indonesia, sistem demokrasi ini tertuang salah satunya dalam bentuk pemilihan umum yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 pada era Presiden Soekarno. Pemilu pertama ini ditujukan untuk memilih anggota Konstituante dan juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemilu tahun 1955 ini menjadi salah satu bukti konkrit komitmen Indonesia dalam menjalankan dan mengimplementasikan asas-asas demokrasi dalam negara. Pun demikian, pada pemilu pertama ini presiden sendiri masih belum dipilih secara langsung oleh rakyat

melalui pemungutan suara. Begitu pula pada masa presiden berikutnya di masa orde baru, Soeharto yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998. Pada Orde Baru, pemilihan presiden dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang anggotanya mayoritas berasal dari anggota partai pendukung presiden menjabat, Partai Golongan Karya dan Fraksi ABRI.

Tahun 2004 merupakan tahun yang krusial dalam penentuan langkah politik di Indonesia. Pada tahun ini, Indonesia pertama kali melangsungkan perhelatan pesta demokrasinya dengan asas-asas demokrasi yang kita kenal sekarang setelah adanya amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara 1945 di tahun 2002 yang mengubah pasal-pasal tertentu terutama pada pasal-pasal mengenai Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, penyelenggaraan pemilu tahun 2004 juga selaras dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Berbeda dengan pemilu-pemilu yang diadakan pada tahun-tahun sebelumnya, pada Pemilu tahun 2004 untuk pertama kalinya rakyat Indonesia dapat memilih presiden dan wakil presidennya langsung bukan melalui hasil pemungutan suara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Salah satu contohnya adalah pada pemilihan umum di awal masa reformasi yakni pada Pemilu tahun 1999 yang dilakukan untuk memilih aspek legislative dan eksekutif. Meski dilakukan pada era reformasi, Pemilu tahun 1999 ini bisa dikatakan masih mengikuti Pemilu seperti pada era Orde Baru dengan aspek yang dipilih oleh rakyat hanya pada aspek legislative. Sementara itu pada aspek eksekutif masih dipilih melalui pemungutan suara oleh MPR. Pemilu ini kemudian dimenangkan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai presiden dan

Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden. Pun demikian, masa jabatan Gus Dur sebagai presiden tidak berlangsung lama dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri sesuai dengan hasil dari Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001.

Pada Pemilihan Presiden tahun 2004 ada lima pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang muncul dan menyampaikan aspirasinya ke masyarakat. Lima pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres tahun 2004 yang secara resmi berkompetisi sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 36/2004 adalah pasangan Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi, Amien Rais dan Siswono Yudhohusodo, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, serta Hamzah Haz dan Agum Gumelar. Masing-masing calon tentu memiliki agenda politiknya masing-masing. Kemenangan pasangan pada perhelatan Pemilu tahun 2004 akan menjadi validasi akan eksistensi pasangan tersebut dalam masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Sebagai rangkaian agenda-agenda politik kemudian disiapkan dan disebarluaskan kepada khalayak supaya merebut hati dan dukungan serta yang pastinya suara pemilih.

Dalam penyampaian agenda politiknya, para politisi baik secara individu maupun kelompok membutuhkan suatu media agar dalam penyampaian dan penyebarluasan agenda politiknya dapat dilaksanakan secara efisien dengan biaya yang relatif murah. Salah satu cara mencapai atau menjangkau massa yang jumlahnya banyak secara efisien adalah dengan memanfaatkan media massa. Salah satu media massa yang dominan pada diselenggarakannya Pemilu tahun 2004 adalah koran. Koran adalah suatu media komunikasi massa yang sangat penting dalam menyampaikan informasi secara factual dan terkini. Koran yang sudah

diperkenalkan sejak abad ke-17 di Eropa selalu menjadi primadona bagi masyarakat selama berabad-abad untuk mendapatkan informasi dari berbagai penjuru. Selama ratusan tahun, koran menjadi salah satu cara untuk mengkomunikasikan informasi kepada masyarakat dalam jumlah yang massif. Menurut (Onong Uchjana Effendy, 1985), koran adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca.

Penting dan krusialnya Pemilu tahun 2004 tentu menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan oleh media pada saat itu. Terutama media cetak koran yang pada saat itu masih menjadi primadona banyak kalangan masyarakat sebagai sumber utama mendapatkan informasi yang faktual. Maka, koran memiliki peran yang krusial dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap suatu kejadian yang berkaitan dengan suatu peserta Pemilu. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi. Menurut (Rakhmat 2007, 89) hubungan persepsi dengan sensasi adalah: Sensasi adalah bagian dari persepsi. Walaupun demikian, menafsirkan makna informasi indrawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi dan memori.

Pada Pemilu tahun 2004, pemberitaan-pemberitaan terhadap suatu golongan, partai, kelompok maupun individu baik positif maupun negative tentu secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap pembangunan persepsi dan

penilaian masyarakat terhadap yang diberitakan. Kerap kali dalam pemberitaannya, media massa bersikap kurang netral terhadap suatu peristiwa yang diberitakan dengan berpihak pada salah satu calon tertentu. Dalam pemberitaannya dapat diberikan dukungan pada satu pasangan calon atau malah menjelekkkan pasangan calon lainnya yang membentuk persepsi tertentu. Hal-hal seperti ini tentu akan memberikan suatu pandangan masyarakat terhadap salah satu pasangan calon. Persepsi masyarakat sendiri dapat dibangun melalui pemilihan judul maupun kata-kata yang digunakan dalam berita serta pengemasan dari berita itu sendiri.

Dalam keberpihakan suatu perusahaan media massa koran, terdapat banyak faktor yang memengaruhi keberpihakan itu sendiri. Baik faktor internal maupun faktor eksternal. Perusahaan koran dengan afiliasi pada kelompok tertentu tentu akan cenderung berpihak pada kelompoknya. Namun, ada pula perusahaan koran independent yang berdiri sendiri tanpa intervensi suatu kelompok. Pada awal tahun 2000-an, ada banyak perusahaan koran yang eksis. Salah satu perusahaan koran yang memiliki banyak pembaca pada masa tersebut adalah Harian Kompas.

Harian Kompas adalah koran Indonesia yang diterbitkan oleh PT. Kompas Media Nusantara yang merupakan bagian dari kelompok usaha Kompas Gramedia (KG). Koran yang semboyan “Amanat Hati Nurani Rakyat” ini didirikan oleh P.K. Ojong dan Jakob Oetama sejak 28 Juni 1965. Nama Kompas sendiri diusulkan oleh Presiden Indonesia pertama, Soekarno dengan arti filosofisnya sebagai pemberi arah dan jalan. Harian Kompas dikenal dengan penyajian beritanya yang cenderung sesuai dengan fakta dan realitas yang ada dan tidak berpihak pada individu, kelompok atau partai manapun. Selain itu, Harian Kompas juga dikenal sebagai

koran yang berlatar belakang beragama Kristen Katolik. Hal ini karena memang awal sejarah Harian Kompas berawal dari harapan Menteri Panglima Angkatan Darat (Menpangad) Letnan Jenderal Ahmad Yani agar ada media alternatif yang berasal dari kalangan Katolik.

Pemberitaan terkait politik pada media surat kabar dapat ditemukan di berbagai peristiwa-peristiwa politik yang terjadi baik di luar negeri maupun dalam negeri. Peristiwa politik besar yang terjadi di dalam negeri seperti pemilu, pilkada, kisruh partai, aksi demo yang masif, hingga pemilihan presiden tentu menjadi topik hangat di kalangan media dan tentunya menjadi isu yang akan hangat di masyarakat. Dalam pemberitaan yang dilakukan oleh kalangan media ini nantinya akan memunculkan condong atau tidaknya media terhadap suatu golongan. Salah satu contoh yang peneliti temukan melalui penelitian yang dilakukan oleh Aditya Pratama Thaib, Desie M. D Warouw, Leviane J.H. Lotulung dengan judul “Analisis Isi Keberpihakan Media Cetak Pada Berita Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019 Di Surat Kabar Harian Manado Post Dan Tribun Manado” yang berhasil menemukan adanya kecondongan Surat Kabar Harian Manado Post pada pemberitaan Pilpres tahun 2019 terhadap calon presiden nomor urut 1. Hal ini dapat dibuktikan dalam pemberitaan yang dilakukan oleh surat kabar ini lebih banyak menjadikan calon presiden nomor urut 1 sebagai *headline* dibanding capres nomor urut 2. Selain itu, kecondongan ini juga terbukti dengan jumlah pemberitaan yang lebih banyak memberitakan tentang calon presiden nomor urut 1.

Berangkat dari penemuan pemberitaan yang tidak netral dan tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalis (KEJ) yang mengharuskan tiap-tiap pers mampu

bersikap netral dalam pemberitaan, peneliti tertarik untuk meneliti terkait pemberitaan yang dilakukan pada surat kabar Kompas sebagai salah satu perusahaan surat kabar terbesar di Indonesia yang menjunjung tinggi unsur independen dan netralitas. Hal ini tercermin dari Kompas yang memiliki semboyan “independen dan terpercaya”.

Dalam melakukan penelitian, penulis menyadari bahwasanya topik seperti penelitian ini sudah pernah dikaji dan ditulis sebelumnya pada beberapa penelitian. Dalam penelesaiannya, penulis menemukan setidaknya dua penelitian serupa seperti pada tesis magister dengan judul “Keberpihakan Media Massa Dalam Pemberitaan Tentang Partai Politik Pada Kampanye Pemilu 2004 : Suatu Analisis Framing Pada Tiga Koran Nasional” oleh Aristy Maydini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2005. Pada penelitiannya, Aristy Maydini mengambil tiga koran nasional yakni Republika, Kompas, Media Indonesia. Dalam penelitiannya, Aristy Maydini lebih memfokuskan pada pemilihan umum legislatif pada tahun 2004. Hal ini tentu menjadi pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh Aristy Maydini yang lebih berfokus pada pemilu legislatif tahun 2004 sementara peneliti melakukan penelitian berfokus pada pilpres tahun 2004. Selain itu, aspek temporal yang digunakan oleh Aristy Maydini sendiri adalah Agustus 2003 sampai Mei 2004 sementara peneliti memiliki aspek temporal Mei 2004 sampai Oktober 2004.

Selanjutnya peneliti juga menemukan penelitian serupa dengan objek yang berbeda pada penelitian skripsi yang dilakukan oleh Putri Ayu Ramadhani dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta dengan judul Analisis Isi Pemberitaan Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua di Koran Harian Media Indonesia dan Koran Harian Republika. Meski penelitian mengambil objek pada Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2019, penelitian yang dilakukan oleh Putri Ayu Ramadhani secara intinya serupa dengan penelitian yang dilakukan yakni sama-sama membahas analisis isi pemberitaan pada koran. Pun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan terutama pada objek yang diambil oleh Putri Ayu R. adalah Pilkada DKI Jakarta tahun 2019 sementara peneliti menggunakan Pilrpes tahun 2004 sebagai objek yang diteliti.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

A. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian mencakup Batasan spasial (ruang) dan juga Batasan temporal (waktu). Dalam penelitian ini, batasan spasial (ruang) yang diambil oleh peneliti adalah Indonesia. Hal ini didasari pada surat kabar Kompas yang mendistribusikan surat kabarnya ke seluruh provinsi di Indonesia. Maka dari itu, pembatasan spasial tidak dapat dipersempit menjadi satu atau beberapa daerah di Indonesia saja.

Sedangkan untuk batasan temporal penelitian ini adalah antara Mei – Oktober 2004. Batas temporal awal yakni pada Mei 2004 didasarkan pada tanggal masa kampanye partai politik pemilu tahun 2004. Selain itu, pemberitaan yang beredar di koran juga baru mulai mengabarkan secara lebih besar mengenai Pemilu tahun 2004 dimulai pada bulan Maret tahun 2004 dengan dibentuk atau dibuat kolom tersendiri untuk berita-berita yang

berkaitan dengan Pemilu tahun 2004. Alasan lain diambilnya batasan temporal awal penelitian pada Mei 2004 didasarkan pula pada Keputusan KPU nomor 36 tahun 2004 tanggal 22 Mei 2004 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Menjadi Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004.

Sementara itu, Batasan akhir penelitian pada Oktober 2004 didasarkan pada berakhirnya perhelatan Pemilu tahun 2004 dengan adanya pelantikan dan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, batas akhir ini bisa dikatakan menjadi titik akhir dari perhelatan Pemilihan Umum tahun 2004.

Selain itu, dibutuhkan pembatasan tematis dalam penelitian agar penelitian lebih tefokus. Tema yang digunakan sebagai pembatasan tematis ini adalah terkait pemberitaan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden tahun 2004.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pemberitaan koran Kompas mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu tahun 2004?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keberpihakan koran Kompas dalam memberitakan mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Umum tahun 2004. Dari keberpihakan dalam

pemberitaan mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat diketahui apakah koran Kompas bersikap netral dalam pemberitaannya atau memiliki kecenderungan *in-favor* terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Umum tahun 2004.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah terutama bagi sejarah pada masa reformasi. Diharapkan pula mampu menjadi referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, kegunaan dari penelitian ini dalam ilmu pengetahuan adalah sebagai tambahan literatur dan pembelajaran bagi masyarakat umum. Selain itu, kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan studi tambahan baik ditingkat sekolah menengah atas maupun universitas.

*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*

D. Metode dan Bahan Sumber

Penelitian ini membahas tentang keberpihakan media massa pada Pemilihan Umum tahun 2004. Penelitian ini penulis menggunakan metode historis dengan pendekatan deskriptif-naratif. Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif-

naratif. Penggunaan metode historis dalam penelitian ini, mengharuskan penelitian dilakukan dengan prosedur dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian sejarah. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka peneliti harus melakukan lima tahap yang sesuai dalam penelitian sejarah. Lima tahap ini meliputi pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik dan keabsahan sumber), interpretasi dan penulisan atau historiografi (Kuntowijoyo 2018b, 69)

a. Pemilihan Topik

Pemilihan topik diartikan sebagai suatu proses untuk memilih tema yang akan dibahas dalam penelitian. Menurut Kuntowijoyo dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah, dalam pemilihan topik penulis dianjurkan untuk memiliki dua kedekatan dalam penelitiannya yakni kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengangkat topik ini karena adanya pengalaman sebagai bagian dari bidang komunikasi di organisasi kampus. Berdasarkan pengalaman, peneliti menyadari krusialnya penyampaian berita yang informatif dan akurat sesuai realita kepada publik. Pengalaman ini kemudian menimbulkan adanya ketertarikan pada bidang komunikasi terutama penyebaran informasi terutama dalam skala besar. Selain itu, peneliti juga terinspirasi dengan ramainya pemberitaan akan adanya keberpihakan media dalam Pemilihan umum pada tahun 2019 silam. Mengkaitkan pengalaman serta isu-isu yang beredar pada beberapa tahun belakangan ini, peneliti kemudian memiliki ketertarikan untuk mengaitkan keduanya. Pemilihan topik Pemilihan Umum tahun 2004 sendiri berangkat dari signifikansi Pemilu tahun 2004 dalam sejarah Indonesia. Sementara itu, pemilihan perusahaan koran Kompas berakar pada aksesibilitas

dan jumlah pembaca atau pelanggan perusahaan koran pada rentang waktu pemilihan umum tahun 2004.

b. Pengumpulan Sumber

Setelah ditentukan topik yang akan diteliti, maka tahap selanjutnya dalam penelitian adalah proses pengumpulan sumber atau data terkait dengan topik penelitian yang diangkat. Sumber primer primer yang menjadi acuan utama penulis dalam melakukan penelitian ini ialah koran yang terbitkan oleh Kompas, pada rentang waktu Pemilihan Umum tahun 2004. Sedangkan sumber sekunder peneliti diperoleh dari berbagai literatur berupa jurnal, buku, skripsi, laporan penelitian dan website di internet yang kredibel.

c. Kritik Sumber

Setelah melakukan tahapan pengumpulan sumber, kemudian dilakukan tahap verifikasi atau kritik sumber. Verifikasi atau kritik sumber sendiri merupakan proses pengujian sumber-sumber yang didapatkan. Sumber-sumber ini kemudian dibandingkan dengan sumber lain dengan tujuan untuk mendapatkan sumber yang orisinil dan kredibel. Sumber primer penulis berupa koran sangat memudahkan dalam menguji kevalidan data. Surat kabar yang tersedia di Perpustakaan Nasional Indonesia sudah dikurasi berdasarkan waktu terbitan semakin mempermudah penulis dalam melakukan verifikasi surat kabar terkait. Kemudian, dilakukan kritik ekstern dengan melakukan pengecekan kebenaran dengan membandingkan surat kabar dan sumber lain agar kebenaran antar sumber dapat dipastikan melalui pengujian silang. Sebagai contoh, dilakukan pengujian silang berdasarkan surat

keputusan KPU terkait calon dengan pemberitaan koran Kompas satu hari setelah terbitkan keputusan KPU tersebut.

d. Interpretasi

Setelah melakukan tahap-tahap di atas, selanjutnya dilakukan tahap interpretasi atau penafsiran sumber. Tahap interpretasi atau penafsiran sumber dapat diartikan sebagai tahap yang ditujukan untuk menyimpulkan fakta-fakta sejarah dan kemudian mencari hubungan antar fakta. Sehingga tiap-tiap perubahan yang terjadi dapat dilihat dengan runtut dan jelas. Selain itu, tahap interpretasi juga memudahkan untuk mengaitkan antara peristiwa satu dengan peristiwa lainnya.

e. Penulisan

Tahap penulisan merupakan tahap terakhir dalam proses penelitian. Pada tahap ini peneliti menyimpulkan fakta-fakta dan mencari hubungan antar fakta yang ditemukan. Kemudian perubahan peristiwa sejarahnya dapat terlihat runtut dan jelas. Untuk menuliskan penelitian, peneliti memanfaatkan sumber-sumber yang telah diperoleh primer maupun sekunder.

*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*